

MASALAH-MASALAH POKOK PENDIDIKAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS, TEORETIK DAN EMPIRIK

Disajikan pada Seminar Nasional bagi guru-guru di Kabupaten Subang – 8 Agustus 2009

Oleh: Prof. Dr. H. Sofyan Sauri, M.Pd

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, berencana dan berlangsung kontinu (terus menerus sepanjang hayat) ke arah membina manusia/anak didik menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya (*civilized*). Terorganisir memiliki makna bahwa pendidikan tersebut dilakukan oleh usaha sadar manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas, ada tahapannya dan ada komitmen bersama dalam proses pendidikan itu. Adapun berencana mengandung arti bahwa pendidikan itu direncanakan sebelumnya, dengan suatu proses perhitungan yang matang dan berbagai sistem pendukung yang disiapkan. Sementara berlangsung kontinu artinya pendidikan itu terus menerus sepanjang hayat, yaitu selama manusia hidup proses pendidikan itu akan tetap dibutuhkan, kecuali apabila manusia sudah mati. Undang-Undang Dasar 45 menyatakan "...kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..." Merujuk kepada rumusan tersebut jelas bahwa pendidikan menjadi salah satu dari tujuan bangsa ini, sehingga isu pendidikan memiliki kedudukan yang strategis untuk selalu dikaji dan dikembangkan.

Abdurahman Al Bani dalam An-Nahlawi (1989:32) memaknai pendidikan sebagai proses menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang baligh, mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi menuju kebaikan dan kesempurnaan secara bertahap. Adapun John Dewey dalam Hambali (1996:3) mengungkapkan bahwa pendidikan adalah proses hidup yang berlangsung terus-menerus ke arah kesempurnaan.

Sementara Tilaar (2000:16) berpendapat bahwa terdapat tiga hal yang perlu di kaji kembali dalam pendidikan. *Pertama*, pendidikan tidak dapat dibatasi hanya sebagai *schooling* belaka. Dengan membatasi pendidikan sebagai *schooling* maka pendidikan terasing dari kehidupan yang nyata dan masyarakat terlempar dari tanggung jawabnya dalam pendidikan. Oleh sebab itu, rumusan mengenai pendidikan dan kurikulumnya yang hanya membedakan antara pendidikan formal dan non formal perlu disempurnakan lagi dengan menempatkan pendidikan informal yang justru akan semakin memegang peranan penting didalam pembentukan tingkah laku manusia dalam kehidupan global yang terbuka. *Kedua*, pendidikan bukan hanya untuk mengembangkan intelegensi akademik peserta didik. Pengembangan seluruh spektrum intelegensi manusia baik jasmaniah maupun rohaniahnya perlu diberikan kesempatan didalam program kurikulum yang luas dan pleksibel, baik didalam pendidikan formal, non formal dan informal. *Ketiga*, pendidikan ternyata bukan hanya membuat manusia pintar tetapi yang lebih penting ialah manusia yang berbudaya dan menyadari hakikat tujuan penciptaannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sindhunata (2000:14) bahwa tujuan pendidikan bukan hanya manusia yang terpelajar tetapi manusia yang berbudaya (*educated and civized human being*). Dengan demikian, proses pendidikan dapat kita rumuskan sebagai proses humanisasi yang berakar pada nilai-nilai moral dan agama, yang berlangsung dalam lingkungan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa, serta kini dan masa depan. Pendidikan merupakan langkah nyata ke arah tercapainya humanisasi yang paripurna. Manusia merupakan objek sekaligus subjek pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan merupakan kegiatan atau tindakan dari, oleh dan untuk manusia.

Berbicara tentang pendidikan maka akan berbicara tentang dua aspek penting, yaitu praktek pendidikan dan teori pendidikan. Praktek pendidikan dapat diartikan sebagai seperangkat kegiatan bersama yang bertujuan membantu pihak lain agar mengalami perubahan tingkah laku yang diharapkan (Sadulloh,2003:1-2). Praktik pendidikan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek tujuan, aspek proses kegiatan dan aspek dorongan atau motivasi. Adapun teori pendidikan dapat diartikan seperangkat konsep yang

sudah tersusun secara sistematis dan teruji secara empirik yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam praktek pendidikan.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, perlu menjadi bahan kajian bersama bahwa kondisi objektif dunia pendidikan secara umum sesungguhnya masih dihadapkan kepada beberapa permasalahan mendasar, permasalahan tersebut secara umum dapat dikelompokkan kedalam empat permasalahan utama yakni ; **Pertama**, terkait dengan kualitas pendidikan yang bisa dilihat dari tiga indikator utama yakni proses pembelajaran yang konvensional, kinerja dan kesejahteraan guru yang belum optimal, jumlah dan kualitas buku di sekolah yang belum memadai. **Kedua**, pemerataan pendidikan, yang bisa dilihat dari tiga indikator utama yakni kerusakan sarana dan prasarana ruang kelas, keterbatasan aksesibilitas dan daya tampung serta kekurangan tenaga guru. **Ketiga**, efisiensi pendidikan, yang bisa dilihat dari tiga indikator yakni penyelenggaraan otonomi pendidikan yang belum optimal (MBS belum optimal), keterbatasan anggaran (kemampuan pemerintah yang terbatas dan rendahnya partisipasi masyarakat), dan mutu SDM pengelola pendidikan. **Keempat**, relevansi pendidikan, yang bisa dilihat dari tiga indikator yakni kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang belum optimal, kurikulum yang belum berbasis masyarakat dan potensi daerah, serta kecakapan hidup (*life skill*) yang dihasilkan belum optimal. Penjelasan lebih lanjut tentang problematika pendidikan di Indonesia akan menjadi fokus uraian selanjutnya.

B. Problematika Pokok Pendidikan di Indonesia.

1. Masalah Tujuan Pendidikan

Salah satu aspek terpenting dari pendidikan, baik secara teori maupun praktek adalah tujuan pendidikan, aktivitas pendidikan merupakan aktivitas yang dilakukan secara sadar dan terencana yang mengarah kepada tujuan tertentu, tujuan berfungsi sebagai pemberi arah dalam praktek sekaligus sebagai gambaran cita-cita yang diharapkan dari serangkaian proses pendidikan yang dilakukan. Suatu kegiatan tanpa tujuan tidak akan jelas arahnya dan sulit untuk mengukur keberhasilannya,

sehingga tujuan dalam pendidikan menjadi suatu hal yang mutlak perlu ada dalam proses pendidikan dan seorang pendidik hendaknya mengetahui, menyadari dan memahami tentang tujuan dari aktivitas yang dilakukannya, sehingga lebih terarah dan lebih jelas parameter keberhasilan dari aktivitas yang dilakukannya.

Dalam prakteknya, tujuan dari pendidikan adalah dalam rangka membantu pihak lain agar mengalami perubahan perilaku, baik secara kognisi, afeksi maupun psikomotor. Namun demikian, dalam konteks filsafat pendidikan, masing-masing aliran memiliki pandangan yang beragam, ada yang menitik beratkan kepada pentingnya pengembangan aspek kognitif seperti halnya aliran *esensialisme*, adapula yang menegaskan bahwa tidak ada tujuan akhir dari pendidikan, yang ada hanyalah tujuan antara atau sementara, hal ini diungkapkan oleh aliran *pragmatisme* atau disebut juga *instrumentalisme*. Keragaman pandangan tentang tujuan pendidikan dipengaruhi oleh sudut pandang masing-masing aliran filsafat pendidikan tentang hakikat realitas (*metafisika*), hakikat pengetahuan (*epistemologi*) dan hakikat nilai (*aksiologi*).

Hubungannya dengan tujuan pendidikan, Laurie E. Gronlund (1997) dalam "*Understanding the National Goals*" menggambarkan proses terjadinya *The National Educational Goals* (tujuan nasional pendidikan) di Amerika, yang inisiatifnya dimulai oleh Presiden Bush dan 50 Gubernur yang berasal dari 50 negara bagian dalam suatu konferensi di Charlottesville, Virginia, pada tahun 1989. Aturan utama yang dipegang untuk menyusun tujuan pendidikan tersebut adalah: "The National Educational Goals Create Clear, Concise Targets for Educational Improvement Relevant to All Americans from Early Childhood Through Adulthood". Proses selanjutnya adalah bahwa tujuan tersebut diadopsi pada tahun 1990 dan harus diukur keberhasilannya dalam tahun 2000. Inilah tujuan-tujuan tersebut.

a. *All children in America will start school ready to learn.*

b. *The high school graduation rate will increase to at least 90 percent.*

- c. *American students will leave grade four, eight, and twelve having demonstrated competency in challenging subject matter, including English, mathematics, science, history, and geography; and every school in America will ensure that all students learn to use their inds well, so they may be prepared for responsible cirizenship, further learning, and productive employment in our modern economy.*
- d. *US students will be first in the world in science and maths achievement.*
- e. *Every adult American will be literate and will possess the knowledge and skills necessary to compete in a global economy and exercise the rights and responsibilities of citizenship.*
- f. *Every school in America will be free of drugs and violence and will offer a disciplined environment conducive to learning.*

Merujuk kepada tujuan di atas, jelaslah bahwa konsep "*clear, concise target*" yang menjadi dasar penyusunan tujuan-tujuan pendidikan tersebut dipenuhi, dari sisi kepentingan hasil dan pengukurannya. Hal yang lebih menarik dari penyusunan tujuan-tujuan pendidikan tersebut adalah mekanisme kontrol yang ditempuh untuk mendorong tujuan-tujuan tersebut agar tercapai pada waktu yang telah disepakati.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, tujuan pendidikan menurut para ahli pengembangan kurikulum dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. Tujuan universal (tujuan manusia pada umumnya) yakni menjadikan manusia yang utuh, kaffah, insan kamil, atau *ibadurrohman*.
- b. Tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan berdasarkan UUNSPN No 20 Tahun 2003.
- c. Tujuan institusional yakni tujuan yang ingin diwujudkan oleh setiap lembaga pendidikan yang digambarkan dalam visi dan misi lembaga pendidikan.
- d. Tujuan kurikuler yakni tujuan yang ingin dicapai pada setiap bidang mata pelajaran

- e. Tujuan pembelajaran (instruksional), yaitu tujuan yang hendak dicapai setelah selesai diselenggarakannya suatu proses pembelajaran. Misalnya satu pertemuan yang bertitik tolak pada perubahan tingkah laku siswa, tujuan ini disusun berdasarkan tujuan kurikulum.

Masalah yang berhubungan dengan tujuan pendidikan ini adalah terkait dengan distorsinya tujuan pendidikan dari tujuan yang bersifat normatif-ideal (tujuan pendidikan nasional) hingga tujuan yang bersifat sangat operasional (tujuan pembelajaran), ketidakpaduan antara *das sollen* dengan *das sein*, serta lemahnya dampak langsung yang meneretas dari rumusan tujuan tersebut terhadap interaksi sosial kehidupan masyarakat. Sebagai contoh dalam konteks pendidikan nasional, baik secara historis konstitusional maupun secara historis instrumentasi kurikuler, jelas bahwa pendidikan nilai-moral menjadi konsepsi yang integral dalam acuan normative pendidikan nasional. Namun demikian, dalam kehidupan sehari-hari, terdapat sejumlah ketimpangan sosial dan moral, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat yang cenderung anarkis, pelanggaran hukum terjadi di setiap lapisan masyarakat, kekalahan dalam Pilkada cenderung berakhir dengan kerusuhan, dan kontrol sosial yang sering lepas tata krama, serta terdegradasinya kewibawaan para pejabat negara.

Pada tataran lingkungan pendidikan, berkembang berbagai gejala melemahnya moralitas seperti maraknya tawuran atau perkelahian antar pelajar, siswa jalan-jalan di pusat perbelanjaan pada saat jam belajar, perbendaharaan kata yang tidak tidak melambungkan seorang terdidik, rasa hormat yang melemah ketika bertemu dengan guru, berpakaian yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah, menggunakan asesoris yang tidak pantas, datang terlambat ke sekolah dan sebagainya. Semua fenomena tersebut mengindikasikan belum berhasilnya pendidikan nilai-moral secara memuaskan baik di persekolahan maupun di luar persekolahan.

Berbagai fenomena amoral bahkan sangat mengkhawatirkan, seperti dapat dilihat dalam laporan hasil polling *Indonesia Foundation (Pikiran Rakyat, 29 Juli 2005)* yang menyebutkan bahwa sedikitnya

38.288 orang remaja di Kabupaten Bandung diduga pernah melakukan seks pra-nikah. Jika jumlah remaja di Kabupaten Bandung mencapai 765.762 orang, maka berarti mereka yang telah melakukan pelanggaran seksual sebesar 50,56%. Sementara Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat mengatakan bahwa aborsi di Indonesia terjadi 2-2,6 juta kasus per tahun dan dilakukan oleh penduduk usia 15-24 tahun (*Pikiran Rakyat*, 6 April 2006).

Padahal tujuan pendidikan nasional yang dilandasi oleh kerangka filosofis pendidikan sangat kental dengan nuansa nilai moral, seperti dalam rumusan tujuan pendidikan nasional No 20 Tahun 2003 yang berbunyi "pendidikan Nasional berfungsi membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, sehat, berilmu, cakap dan kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab"

Tujuan pendidikan akan sangat berpengaruh pada implementasi, dinamika, arah, dan pelaksanaan pendidikan Karena itu, tujuan pendidikan nasional tidak boleh melupakan landasan konseptual filosofi pendidikan yang membebaskan dan mampu menyiapkan generasi masa depan untuk bisa bertahan hidup (*survive*) dan berhasil menghadapi tantangan-tantangan zamannya serta memiliki karakter/kepribadian yang mantap sebagai gambaran sosok manusia utuh yang dicita-citakan.

2. Persamaan Hak dan Pemerataan Pendidikan

Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warganegara untuk memperoleh pendidikan. Setiap warga Negara berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu, tapi kenyataan sekarang pendidikan bermutu hanya dinikmati orang-orang

kaya yang mempunyai kemampuan financial memadai, sedangkan masyarakat bawah terpinggirkan tidak dapat menikmati pendidikan yang betul-betul layak, baik dari segi sarana dan prasarana, maupun dari aspek mutu layanan pendidikan. Pendidikan berkualitas baru menjadi konsumsi para elit dan masyarakat atas.

Program Wajar Dikdas Gratis yang digagas pemerintah merupakan program positif yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan pemerataan akses pendidikan. Namun, dengan catatan program tersebut tidak hanya dijadikan sebagai komoditas politik. Program tersebut juga harus diikuti oleh perhitungan yang matang agar sekolah tidak melupakan kualitas hanya karena tidak adanya *cash money* yang likuid dan bisa digunakan kapan saja untuk melaksanakan program sekolah. Program BOS yang kiranya dapat dijadikan sebagai solusi alternatif atas digratiskannya biaya pendidikan harus betul-betul ditentukan besaran dan momentum pencairannya dengan tepat, sehingga tidak menjadi apologi sekolah untuk menjalankan program-program yang berkualitasnya.

3. Relevansi Pendidikan

Relevansi pendidikan bisa dilihat dari tiga indikator yakni kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang belum optimal, kurikulum yang belum berbasis masyarakat dan potensi daerah, serta kecakapan hidup (*life skill*) yang dihasilkan belum optimal. Hal tersebut menyebabkan output pendidikan hanya melahirkan generasi penyumbang angka pengangguran, lulusan yang rigid (kaku), tidak adaptif, tidak peka terhadap permasalahan sosial, serta pemahamannya tidak kontekstual.

Rancangan pembelajaran yang terformulasikan ke dalam kurikulum sering kali berubah-ubah, ganti menteri ganti kebijakan seakan kurikulum pendidikan di persekolahan adalah produk politik serta muatannya tidak terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat, proses pembelajaran tidak kontekstual sehingga terjadi distorsi antara apa yang dibelajarkan dengan tuntutan dunia nyata. Dalam konteks pendidikan pada tingkat

persekolahan, adanya kebijakan pengembangan kurikulum menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) member *opportunity* bagi para praktisi pendidikan untuk membuat rancangan pembelajarannya yang berbasis kepada konteks sosial serta kearifan lokal yang berkembang di sekitar lingkungan hidup peserta didik. Kecakapan hidup yang dikembangkan bisa bersandar kepada potensi lokal, tuntutan kekinian dari dunia kerja serta *trend* global yang berkembang. Dengan demikian, pendidikan bisa menjawab kebutuhan perkembangan zaman dan tantangan yang terjadi dalam konteks sosial peserta didik.

4. Antara Pelayanan dan Kualitas Pendidikan

Pelayanan pendidikan harus menjadi tanggung jawab semua, baik pemerintah, masyarakat, sekolah, serta orang tua. Pelayanan harus menjadi terintegrasi dalam pengelolaan pendidikan pusat dan daerah, karena setiap pengelola pendidikan memiliki tanggung jawab terbaik bagi pelanggan pendidikan (siswa, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan sebagainya). Pengelolaan pendidikan di masa lampau terlalu berlebihan penekanannya pada aspek kognitif, mengabaikan dimensi-dimensi lainnya sehingga buahnya melahirkan generasi yang mengidap *split personality*.

Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau gagal melahirkan lulusan (SDM) yang siap berkompetisi di dunia global. Masalah mutu pendidikan juga mencakup masalah pemerataan mutu pendidikan. Pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia, dan manajemen pendidikan.

5. Masalah Pendanaan dan Efisiensi Pendidikan

Pendanaan harus diimplementasikan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 4 yang menjelaskan bahwa anggaran penyelenggaraan Pendidikan Nasional minimal sebesar 20 % diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan dana tersebut harus

sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan, sehingga akuntabilitas dan efesiesinya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, bukan sebaliknya terjadi kebocoran di berbagai bidang pendidikan. Pendidikan bermutu memang mahal, tetapi kenaikan anggaran pendidikan 20 % pun tidak banyak membantu jika kreatifitas Depdiknas hanya pada proyek-proyek pendidikan bukan pada pengembangan pendidikan.

Untuk mempercepat dan memperluas budaya belajar sebaiknya anggaran pendidikan Negara bukan hanya diperuntukkan bagi sekolah formal, tetapi juga untuk sekolah informal dan sekolah non formal. Pada satu titik nanti pasar tenaga kerja tidak lagi melihat ijazah sekolah formal tetapi melihat skill tenaga kerja, dan ini bisa dikermbangkan di sekolah informal dan non formal.

6. Problem kesadaran masyarakat.

Problem kesadaran masyarakat Indonesia yang belum mencapai tahapan "kesadaran kritis" (*critical consciousness*). Setiap kasus yang terjadi selalu memposisikan masyarakat bawah sebagai yang tertindas, namun mereka tidak kuasa melawan penindasan itu. Dalam istilahnya Paulo Freire, mereka telah tenggelam dalam "budaya bisu." Kondisi mereka selalu tertekan, namun tidak kuasa untuk meluapkan seluruh aspirasi karena otoritas kekuasaan pemerintah yang sangat dominan.

Program Wajar Dikdas gratis di satu sisi membuka akses bagi masyarakat bawah, namun disisi lain menjadikan partisipasi masyarakat untuk membangun pendidikan menjadi melepuh, hal ini harus segera diantisipasi jangan sampai kepedulian masyarakat betul-betul hilang sehingga ketika menemukan bangunan sekolah yang bocor saja harus menunggu dana BOS dari APBN turun, hal ini sangat berbahaya. Oleh karenanya, manajemen berbasis masyarakat (MBS) harus betul-betul dirancang sedemikian rupa sehingga sinergitas antara pemerintah dan masyarakat tetap terjaga, karena sesungguhnya pendidikan tidak akan berhasil dengan hanya mengandalkan sekolah (pemerintah), melainkan

perlu dukungan nyata dari lingkungan keluarga dan masyarakat (tri pusat pendidikan).

C. Penutup

Pendidikan nasional dalam tataran praktek, belum menunjukkan proses dan hasil yang ideal, berbagai problematika masih muncul sebagai akibat dari adanya distorsi antara kerangka filosofis dan empiris, serta berbagai faktor teknis seperti isu pendidikan yang hanya dijadikan komoditas politik tanpa disertai dengan adanya *political will* dan *political action* dari pemerintah. Berangkat dari problematika tersebut, maka diperlukan adanya keterpaduan langkah dari *shareholder* dan *stakeholder* pendidikan untuk melakukan reorientasi paradigma pengembangan pendidikan secara nasional serta melakukan upaya-upaya strategis dan taktis yang melibatkan pelaku pendidikan pada satuan pendidikan, baik kepala maupun guru sebagai subyek pendidikan yang keterlibatan dalam tataran operasional sangat dominan.